

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel PAD berpengaruh terhadap SILPA pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan, sehingga hipotesis pertama diterima. Hal ini dikarenakan realisasi PAD yang nilainya besar dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, selain itu realisasinya juga lebih besar dari yang telah dianggarkan sehingga terjadi selisih kelebihan penerimaan yang menyebabkan adanya SILPA pada akhir tahun anggaran.
2. Variabel dana perimbangan berpengaruh terhadap SILPA pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan, sehingga hipotesis kedua diterima. Hal ini dikarenakan dana perimbangan yang nilainya besar dan selalu mengalami peningkatan, selain itu penyerapan anggaran untuk dana perimbangan masih rendah sehingga menyebabkan adanya SILPA pada akhir tahun anggaran.
3. Variabel belanja modal berpengaruh terhadap SILPA pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan, sehingga hipotesis ketiga diterima. Hal ini dikarenakan belanja modal yang nilainya cukup kecil dan realisasinya juga lebih kecil dari yang telah dianggarkan atau dengan kata lain pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan cenderung memiliki tingkat efisiensi belanja yang tinggi sehingga terjadi selisih kelebihan dana yang tidak digunakan untuk belanja yang menyebabkan adanya SILPA pada akhir tahun anggaran.
4. Variabl PAD, dana perimbangan dan belanja modal secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap SILPA pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan, sehingga hipotesis keempat diterima. PAD, dana perimbangan dan belanja modal dapat memengaruhi SILPA sebesar tiga puluh tujuh persen, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian ini, maka di sarankan kepada :

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan harus memperhatikan penggunaan PAD yang diterima pemerintah daerah, melalui ketepatan perencanaan alokasi PAD yang realistis serta ketepatan waktu pelaksanaan pencairan dan pembelanjaan PAD serta lebih memperhatikan dalam proses pengelolaan.
2. Pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan harus memperhatikan penggunaan dana perimbangan dari pemerintah pusat, melalui ketepatan perencanaan alokasi dana perimbangan dan target transfer dana perimbangan yang realistis serta ketepatan waktu pelaksanaan pencairan dan pembelanjaan dana perimbangan serta kemudahan dalam proses pengelolaan.
3. Pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan harus memperhatikan penggunaan belanja modal. Pengoptimalan penggunaan dana dalam bidang belanja modal dapat dilakukan, karena besarnya selisih dari anggaran dan realisasi merupakan faktor yang dapat menyebabkan munculnya SILPA pada akhir anggaran.
4. Pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini adalah SKPD DPPKAD dan Bappeda perlu memperbaiki kinerja khususnya dibidang perencanaan anggaran, dengan meningkatnya anggaran penerimaan dan mengurangi anggaran belanja sehingga angka SILPA dapat ditekan. Karena besarnya selisih dari anggaran dan realisasi penerimaan merupakan faktor prioritas yang menjadi penyebab terbentunya sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) pada perhitungan APBD kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan.
5. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya dapat menambah variabel lain sehingga hasil yang diperoleh dapat digeneralisasi, karena masih banyak faktor-faktor lain yang ikut berkontribusi terhadap SILPA.